

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BELA NEGARA MASYARAKAT
PERBATASAN SEBAGAI PENGUATAN DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN PROXY WAR :**

**Studi Kasus di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara**

**THE IMPLEMENTATION OF "BELA NEGARA" VALUES OF BORDER
SOCIETY AS A STRENGTHENED TO DEAL WITH PROXY WAR THREAT:
Case Study in Sungai Limau village, District Central Sebatik,
Nunukan, North Kalimantan Province**

Wahyudi¹

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia
(Sebatik.wahyudi@gmail.com)

Abstrak – Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perang proxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa ini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan.

Kata Kunci : bela negara, perang proxy, masyarakat perbatasan

Abstract – Conditions of border area village of Sungai Limau, District Central Sebatik Nunukan Regency, North Kalimantan province was geographically adjacent to the neighbour country Malaysia and the existence of two community groups who are different, both ethnically and religiously, have become challenges in the social life in Borderland area. From the aspect of Defence Studies, the dynamics could be potential targets of the Proxy War through the Border Region. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of Bela Negara values to deal with that. This study aims to analyze the shape of the implementation of the values of the state defense in the border village of Sungai Limau in facing various challenges such as the threat of proxy war that is susceptible now, using a knife analysis of the conception of Bela Negara (State Defense) and Proxy War and Society Conception border. This study uses a qualitative method through the collection of data obtains from interviews,

¹ Alumni Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Indonesia, email : Wahyudi.sebatik@yahoo.com

observation, and literature. The result shows that the implementation of the values of state defense of border communities in Sungai Limau has the potential power that could be developed in the form of attitudes and practices of national and state awareness and make Pancasila as the state ideology and means of unifying societies that is shown in the daily life. This can be a social capital to deal with threats of proxy war in the border area.

Keywords : bela negara (state defense), proxy war, the border communities

Pendahuluan

Pulau Sebatik merupakan pulau yang berhadapan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau Sebatik yang berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia tersebut tidak hanya menghadapi persoalan mengenai pertahanan dan keamanan tetapi juga menghadapi isu ekonomi, sosial budaya, lingkungan (geospasial) yang kompleks. Selain itu, Pulau Sebatik merupakan wilayah perbatasan yang berada dalam satu wilayah dengan dua negara yang berbeda.²

Desa Sungai Limau yang secara geografis, terletak di Pulau Sebatik Indonesia dan merupakan salah satu desa terdepan dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa ini terdiri dari dua etnis pendatang, yaitu etnis Bugis dan etnis Timor dengan agama Islam dan Kristen Katolik yang dianut oleh masyarakatnya. Selain itu Masyarakat Desa Sungai Limau menjalin interaksi secara langsung dengan masyarakat Malaysia yang ada di kawasan Sebatik Malaysia yang berbatasan

darat secara langsung dengan wilayah kecamatan Sebatik Tengah Indonesia.³

Wilayah perbatasan dari perspektif pertahanan merupakan wilayah yang harus dijaga kedaulatannya baik dari gangguan internal maupun eksternal, karena ancaman bagi kedaulatan negara khususnya di perbatasan dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.⁴ Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menjelaskan bahwa kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dinyatakan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini diperkuat oleh Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008 yang menyatakan bahwa beberapa bentuk ancaman di perbatasan dapat berupa agresi hingga konflik komunal.⁵

Ketergantungan mereka (Masyarakat Perbatasan Sebatik) yang sangat tinggi terhadap wilayah luar

² Sobar Sutisna, *Kajian Pertahanan Perbatasan, Rencana Pengembangan Kota Mandiri Pulau Sebatik Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, (Jakarta : Universitas Pertahanan, 2011).

³ Mardin, *Profil Desa Sungai Limau*, (Sebatik : Pemerintah Desa Sungai Limau, 2014).

⁴ Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan*, (Jakarta: Kemhan RI, 2008).

⁵ *Ibid.*

negeri (Malaysia) bisa menyebabkan nasionalisme mereka sedikit-demi sedikit terkikis. Negara Malaysia bisa saja sewaktu-waktu memeralat mereka untuk melakukan infiltrasi di negaranya sendiri, atau mempengaruhi batas wilayah dengan cara menggeser patok batas negara, atau melakukan aksi teror, dan lain-lain.⁶

Kondisi pulau Sebatik yang merupakan salah satu dari OBP (*Outstanding Boundary Problems*) juga berpotensi menjadi sumber konflik ke depan, dimana garis pantai Timur pulau ini merupakan titik awal penarikan garis batas laut kedaulatan negara di laut. Nilai strategis lainnya terkait keberadaan Ambalat yang kaya sumber daya Alam yang tak jauh dari pulau Sebatik. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat ALKI, yaitu ALKI I dan ALKI II yang mengapit ujung timur pulau Kalimantan dan sekaligus sebagai perlintasan dagang, logistik, bahan bakar dan gas kawasan di sekitarnya. Nilai strategis lainnya terkait dengan lokasi kota Tawau yang sangat dekat dengan pulau Sebatik. Kota Tawau merupakan kota terbesar ke-3 di wilayah Negara Bagian Sabah yang menjadi pusat bisnis kawasan timur Malaysia.⁷

Kewaspadaan bangsa Indonesia terhadap berbagai pihak harus ditingkatkan oleh semua komponen bangsa, termasuk masyarakat yang ada di perbatasan, pulau kecil terluar

⁶ Ariwibowo, dkk, *Kajian akademis Usulan Daerah Otonomi Baru Kota Sebatik Kalimantan Timur*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012).

⁷ Sobar Sutisna, *op.cit.*

dan wilayah pedalaman. Wilayah perbatasan yang luas baik darat dan laut tidak dapat terjaga optimal oleh TNI karena keterbatasan personil dan peralatan. Masyarakat perbatasan yang setiap hari bersentuhan dengan orang asing dari negara yang berbatasan dengan Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan mengingat wilayah perbatasan merupakan pintu masuk bagi berbagai kegiatan orang ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewaspadaan yang tinggi dari masyarakat wilayah perbatasan tentunya berbeda dengan masyarakat di perkotaan dan di pedesaan lain. Masyarakat perbatasan sangat rawan dengan penetrasi dan infiltrasi asing karena secara geografis langsung bersentuhan dengan negara lain dan secara ekonomi terdapat interaksi dan transaksi ekonomi serta secara sosial kultural terdapat hubungan kekerabatan yang erat. Kompleksitas permasalahan masyarakat di perbatasan sangat rawan disusupi oleh berbagai kepentingan asing yang dapat mengancam persatuan dan membahayakan keutuhan NKRI, sehingga dinamika masyarakat perbatasan ini tentu sangat penting untuk diperhatikan, diprioritaskan dan dibina agar dapat menjadi daya tangkal yang ampuh dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan dengan pendidikan dan pelatihan bela negara yang komprehensif⁸

Hal ini patut diperhatikan mengingat bahwa di masa kini ancaman *proxy war*

⁸ Agus Subagyo, *Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : PT Graha Ilmu, 2015).

yang bersifat *soft power* (kekuatan lunak) dapat menghancurkan lawan dengan efek jitu tanpa menggunakan senjata konvensional menjadi ancaman terhadap sebuah negara khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan sebuah negara. Perang *proxy* dimaknai sebagai perang konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal⁹.

Upaya masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dalam membela negara harus didorong atas kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk ikut bela negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga wajib untuk ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Penyelenggaraan bela negara dalam upaya pertahanan negara didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.¹⁰

⁹ Gatot Nurmantyo, *Perubahan Latar Belakang dan Daerah Konflik : Tantangan dan Ancaman terhadap Sistem Pertahanan Negara dan Bela Negara*, (Jakarta : Mabes TNI, 2015).

¹⁰ Budi Mardjoko, *Implementasi Program Garda Batas dalam rangka Bela Negara di Pulau Sebatik*, (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2013).

Konsep Bela Negara dan Perang Proxy

Menurut UUD 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sementara itu, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Pertahanan Negara, Upaya Bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdasarkan konsepsi tatanan dasar Bela Negara Kementerian pertahanan bahwa nilai-nilai bela negara bersifat *soft power* berupa karakter dan jati diri yang seyogyanya dimiliki seorang warga negara Indonesia yang terdiri dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, menjadikan pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara.¹¹

Pembinaan kesadaran bela negara dilandasi pada rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Rasa cinta tanah air berarti mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan

¹¹ Ditjenpothan Kementerian Pertahanan, *Tataran Dasar Bela Negara*, (Jakarta: Kemhan RI, 2014).

pekarangan serta ruang wilayah Indonesia. Bela negara didasarkan pada rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan, mencintai budaya bangsa dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Bela negara didasarkan pada keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memahami hakikat atau nilai dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Bela negara adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran serta jiwa raga untuk bangsa dan negara.¹²

Kerangka pengembangan SDM perbatasan, diperlukan pendekatan pertahanan yang telah di sepakati sebagai multidisiplin keilmuan dan juga berdasarkan realitas kehidupan masyarakat perbatasan dan prediksi ke depan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut dinyatakan untuk meyakinkan bahwa “bela negara” adalah suatu “nilai intrinsik” sehingga diperlukan berbagai disiplin untuk menganalisis SDM pertahanan di wilayah perbatasan, yaitu salah satu yang perlu digagas pertahanan di wilayah perbatasan, adalah antropologi pertahanan yang memandang pertahanan dari sisi antropologi. Bagaimanapun juga, pada suatu masyarakat, dalam nilai-

nilai budayanya terdapat mekanisme pertahanan yang khas yang sesuai dengan budaya masyarakat tersebut.¹³

Subagyo¹⁴ menyatakan bahwa penguatan kesadaran bela negara khususnya di wilayah perbatasan memiliki arti penting mengingat masyarakat perbatasan merupakan benteng pertahanan utama dalam melawan berbagai ancaman, berupa infiltrasi dan penetrasi asing yang masuk ke wilayah Indonesia sehingga mengancam kedaulatan negara. Masyarakat perbatasan harus terus mengembangkan dan menumbuhkan semangat bela negara agar tidak mudah goyah oleh provokasi, hasutan maupun iming-iming kekuatan dari pihak asing yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Sementara itu *proxy war*¹⁵ diartikan sebagai perang konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti merupakan negara kecil, namun kadang juga bisa aktor non negara (*Non State Actor*) yang dapat berwujud LSM, Ormas, kelompok masyarakat atau perorangan. Singkatnya *proxy war* merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya

¹² TB. Hasanuddin, *Bela Negara dan Kontradiksi Wacana Wajib Militer Indonesia*, (Jakarta : PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014).

¹³ Budi Mardjoko, *op.cit.*

¹⁴ Agus Subagyo, *Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : PT Graha Ilmu, 2015).

¹⁵ Gatot Nurmantyo, *op.cit.*

mendapatkan kepentingan strategisnya namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah.

Dalam studi ini, konsep bela negara dilihat dari bentuk implementasi nilai-nilai bela negara yang memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan di dalam masyarakat berdasarkan konsepsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan¹⁶ yang terdiri dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara. Kekuatan implementasi nilai-nilai bela negara yang bersifat *soft power* tersebut akan menjadi modal dalam menghadapi bentuk-bentuk ancaman *Proxy War* yang bersifat *soft power* yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Di antaranya adalah ancaman dalam bentuk separatisme, demonstrasi massa, penerapan regulasi yang merugikan, peredaran narkoba dan bentrok antar kelompok.¹⁷

Konsep Masyarakat Perbatasan

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.¹⁸ Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa

¹⁶ Ditjenpothan Kementerian Pertahanan, *op.cit.*

¹⁷ Gatot Nurmantyo, *op.cit.*

¹⁸ Schaefer dan Lamm, 1998, dalam Syahril Syarbani, *Konsep Dasar Sosiologi dan Antropologi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Hartomo Media Pustaka, 2012).

masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.¹⁹ Sedangkan, Selo Sumardjan memberi definisi masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.²⁰

Menurut Syarbaini,²¹ masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup dalam teritori yang sama, dimana mereka terikat oleh nilai-nilai tertentu yang mampu mengarahkan anggota-anggotanya bertindak sesuai nilai-nilai tersebut dan dari interaksi yang ada masyarakat sebagai satu kesatuan mampu menghasilkan sebuah kebudayaan tertentu. Pada studi ini, pengertian masyarakat perbatasan merujuk pada penjelasan tersebut, yaitu sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah sebuah negara yang berbatasan secara geografis dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian batas wilayah.

Sementara itu, kata *Border* atau perbatasan mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan, wilayah perbatasan mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang

¹⁹ Macionis, 1997 dalam Syahril Syarbani, *Konsep Dasar Sosiologi dan Antropologi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Hartomo Media Pustaka, 2012).

²⁰ Setiadi dan Kolip, 2010 dalam Syahril Syarbani, *Konsep Dasar Sosiologi dan Antropologi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Hartomo Media Pustaka, 2012).

²¹ Syahril Syarbani, *Konsep Dasar Sosiologi dan Antropologi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Hartomo Media Pustaka, 2012).

berbeda.²² Jadi menurut Guo, wilayah perbatasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua atau lebih negara yang berbeda, namun dapat pula ditemui dalam suatu negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah dua yuridiksi yang berbeda.

Intinya, wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yuridiksi yang berbeda.²³ Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau *states border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya, penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.²⁴ Lebih lanjut, menurut Arifin²⁵, proses pembentukan perbatasan suatu negara, terdapat perbedaan antara perbatasan laut dan perbatasan darat. Dalam perbatasan laut, para ilmuwan membangun teori yang didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Dalam konvensi hukum laut tersebut ditegaskan bahwa kerangka hukum dasar menyangkut garis pangkal, luas

wilayah laut dan laut dalam. Namun untuk perbatasan darat, kontribusi besar disumbangkan oleh para ahli geografi, seperti Ratzel dari Jerman yang membangun fondasi teori “space conception”. Dalam teori ini disebutkan pula bahwa sebuah negara adalah tempat tinggal organisme yang tumbuh dan punah.

Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan.²⁶ Lebih lanjut, menurut Mahendra Putra Kurnia, kawasan perbatasan adalah suatu kawasan yang berbatasan dengan negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/ perjanjian antar dua negara atau lebih yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya.²⁷

Secara umum daerah perbatasan mempunyai karakteristik tertentu,²⁸ *Pertama*, lokasi yang relatif terpencil dan terisolir dengan aksesibilitas yang rendah. *Kedua*, potensi sumber daya alam cukup besar. Potensi sumber daya alam di kawasan perbatasan memiliki nilai

²² Guo dalam Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014).

²³ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014).

²⁴ Irma Sariama, “Peran TNI dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik”, *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, Vol. 2, No.1, hlm. 71-82.

²⁵ Saru Arifin, *op.cit.*

²⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan*, (Yogyakarta: PT Gava Media, 2008).

²⁷ Mahendra Putra Kurnia, *Kawasan Perbatasan RI: Kesabaran Tak Terbatas Menanti Janji Sebatas Janji*, (Malang : PT. Intrans Institute, 2011).

²⁸ Nuraesnaini, Poppy Setiawati, *op.cit.*

ekonomi yang belum dikembangkan. Potensi tersebut berupa hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka, daerah yang memiliki kandungan mineral, tembaga, emas dan logam lainnya, serta pulau yang memiliki potensi sumber daya kelautan baik sebagai sumber daya perikanan, wilayah konservasi dan kawasan wisata bahari. *Ketiga*, penyebaran penduduk tidak merata. Umumnya mata pencaharian penduduk di sekitar kawasan perbatasan adalah bertani, berkebun dan nelayan. *Keempat*, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan pada umumnya rendah. Dengan kondisi seperti ini maka masyarakat di kawasan perbatasan lebih berorientasi pada kegiatan sosial ekonomi di wilayah negara tetangga yang lebih mapan.

Wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dilihat dari aspek sosial budaya, berkaitan erat dengan gambaran kehidupan masyarakatnya yang penuh dengan dinamika. Keadaan masyarakat di kawasan perbatasan saat ini tidak memiliki aksesibilitas yang baik dan masih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi negara tetangga. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan adanya kondisi yang lebih baik atau pengaruh sosial dan ekonomi yang lebih kuat dari negara tetangga.²⁹

Masyarakat perbatasan yang dimaksud dalam studi ini merupakan masyarakat yang tinggal dan menetap di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik
²⁹ *Ibid.*

Tengan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan secara langsung dengan negeri jiran Malaysia.

Implementasi Penguatan Nilai-nilai Bela Negara Berupa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di Desa Sungai Limau

Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa terdapat beberapa kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat perbatasan desa Sungai Limau yang dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan implementasi bela negara, yaitu adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh masyarakat yang ditunjukkan lewat sikap aktif masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan, keikutsertaan dalam pemilihan umum dan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan konsepsi bela negara ditjenpothan³⁰ yang menyebutkan bahwa indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan lewat sikap sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat, profesi maupun politik;
- b. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Ikut serta dalam pemilihan umum;
- d. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya;
- e. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

³⁰ Ditjenpothan Kementerian Pertahanan, *op.cit.*

Dalam implementasinya masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau menunjukkan bentuk implementasi bela negara berupa kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk sebagai berikut:

Berpartisipasi Aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat Desa Sungai Limau merupakan masyarakat yang aktif dalam mengikuti berbagai aktivitas kemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya masyarakat di Desa Sungai Limau dalam mengikuti dan membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokalistik yang bertujuan membantu pemerintah dalam menyukseskan agenda-agenda kebangsaan seperti Organisasi pemuda OM JOKO (Orang Muda Berjoko) yang fokus pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kegiatan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama. Organisasi kepemudaan ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh Ikatan Remaja Masjid dan Ikatan Remaja Katolik yang ada di Desa Sungai Limau. Nama Berjoko diambil dari nama dusun di Desa Sungai Limau yang menjadi *basecamp* mereka dalam merancang kegiatan bersama.

Begitupun halnya organisasi kepemudaan PEPSIL (Persatuan Pemuda Sungai Limau), yang dibentuk oleh pemuda Desa Sungai Limau yang semula ditujukan untuk menamai grup sepak bola mereka. Dalam perjalanannya, organisasi ini berperan layaknya Karang Taruna yang aktif menyukseskan agenda-agenda desa,

khususnya kegiatan kepemudaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga, seperti melaksanakan event-event olahraga, gotong royong hingga kegiatan upacara bendera 17 agustus yang turut melibatkan warga Desa Sungai Pukul (Malaysia) sebagai tamu undangan. Selain OM JOKO dan PEPSIL, terdapat pula organisasi Forum Bela Negara (FBN) Sebatik yang diketuai oleh warga Kecamatan Sebatik Tengah, kecamatan yang menjadi lokasi keberadaan desa Sungai Limau. Di organisasi ini pula, banyak pemuda Desa Sungai Limau yang turut serta menjadi anggotanya. FBN Sebatik *concern* pada penyadaran kesadaran bela negara di tengah masyarakat lewat kegiatan-kegiatan yang bertema nasionalisme. Desa Sungai Limau menjadi target utama FBN Sebatik, lewat aksi penanaman seribu bibit pohon yang ditanam di sepanjang patok-patok batas negara yang ada di Desa Sungai Limau. Kegiatan tersebut sukses terlaksana setiap tahun yang melibatkan aparat, masyarakat umum dan pemuda desa Sungai Limau.

Selain itu, terdapat pula kelompok PKK yang aktif melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan desa dan pemberdayaan wanita. Beberapa kegiatan yang sukses dilakukan berdasarkan data yang didapatkan dari kantor Desa Sungai Limau, antara lain pada tahun 2013 pemerintah desa bekerjasama dengan PKK, Kecamatan dan Yayasan Ar-Rasyid Desa Sungai Limau melaksanakan kegiatan pemberantasan buta huruf melalui pendidikan “Keaksaraan Fungsional” (tingkat Dasar dan Mandiri).

Selain itu, mereka pun turut mencetuskan industri kecil dan menengah di Desa Sungai Limau yang mulai di promosikan sejak tahun 2013. Berbagai hasil olahan dari UP2K dan usaha binaan Yayasan Ar-Rasyid Desa Sungai Limau sudah mulai mereka pasarkan, dimana skalanya masih di sekitar Kecamatan Sebatik Tengah dan saat ini sudah memasuki wilayah Nunukan melalui Koperasi Disperidagkop.

Ikut Serta dalam Pemilihan Umum

Mayoritas penduduk Desa Sungai Limau turut serta dalam memberikan hak pilihnya pada pemilihan Legislatif maupun eksekutif. Berdasarkan data yang diperoleh disebutkan bahwa pada tahun 2014 jumlah warga yang memiliki hak pilih adalah 2.010 orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 1.332 orang.³¹ Begitupun halnya, jumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 adalah 1.687 orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 834 orang.³² Lebih lanjut berdasarkan data, jumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2011 adalah 1.527 orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 1.088 orang. Begitupun halnya penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilihan Kepala Desa adalah 1.041 orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 759 orang.³³

³¹ Mardin, *op.cit.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Berdasarkan data terlihat bahwa mayoritas masyarakat turut berpartisipasi dalam pemilu, meskipun masih diperlukan peningkatan agar partisipasi pemilih meningkat. Data ini pun menunjukkan bahwa hubungan yang positif antara pemerintah dengan masyarakat terwujud dalam bentuk partisipasi warga dalam mengikuti pemilihan Umum.

Berpartisipasi dalam Menjaga Kedaulatan Bangsa dan Negara

Petani adalah profesi mayoritas masyarakat perbatasan Sebatik di Desa Sungai Limau, pada umumnya mereka menggarap lahan kebun sawit, kakau, pisang hingga jenis palawija lainnya sebagai pekerjaan sehari-harinya. Petani perbatasan yang mendiami seputaran wilayah batas darat, khususnya di Desa Sungai Limau selama ini aktif menjaga batas-batas negara Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia. 18 patok yang tertanam di Pulau Sebatik yang menjadi penanda batas negara selama ini menjadi wilayah perkebunan yang mereka tanami sebagai lahan pertanian seperti pisang, kelapa sawit dan coklat. Keberadaan petani di perbatasan darat ini sangat vital, karena wilayah batas darat pulau Sebatik merupakan “jalur tikus” masuknya aktivitas ilegal oleh warga negara Asing.

Penuturan seorang tokoh di Sebatik yang bernama Roga menyatakan bahwa ia bahkan sempat mengusir aktivitas *illegal logging* dari perusahaan asal Malaysia yang mencoba untuk membatat batang

kayu yang notabene wilayah tersebut masuk wilayah Indonesia di sekitar patok 11 yang berada di dekat kebun kakao miliknya. Roga dengan parang yang biasa digunakan untuk aktivitas bertani kebun coklat, ia hunus untuk mengusir pekerja perusahaan sehingga mereka keluar dari wilayah NKRI. Berbeda dengan Roga, Nardi seorang petani kebun sawit sempat bersengketa dengan seorang kepala kampung di Sebatik wilayah Malaysia. Kepala Kampung di Sebatik Malaysia tersebut mengklaim bahwa wilayah yang digarap oleh Nardi masuk dalam wilayah kerajaan Malaysia. Nardi tak mau kalah, dengan berbekal peta dan patok batas negara yang berada pada posisi 4' 10 Menit LU, ia bersikukuh untuk tetap menggarap lahan yang secara nyata berada dalam kawasan NKRI walau ia kerap mendapatkan ancaman dan teror dari warga seberang.

Pada 27 desember 2015, pemerintah bersama masyarakat melakukan penanaman seribu pohon di patok perbatasan 6-7 yang berada dalam area Desa Sungai Limau yang berbatasan langsung dengan kampung Sungai Pukul (Malaysia), dalam rangka menegaskan titik-titik perbatasan dimana tahun sebelumnya mereka pun telah sukses melakukan penanaman seribu pohon di patok 5-6. Kegiatan ini dimotori oleh Forum Bela Negara (FBN) Sebatik dan aparat setempat. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa warga sangat antusias untuk ikut serta dalam kegiatan ini, berbagai organisasi kepemudaan beserta unsur pemerintah dan TNI turut

menghadiri acara penanaman seribu pohon di patok-patok perbatasan ini. Oleh penyelenggara, kegiatan ini dimaksudkan untuk menegaskan patok-patok perbatasan negara yang kabur di Sebatik, dengan adanya penanaman pohon ini diharapkan kedaulatan NKRI bisa tetap tegak di Perbatasan.

Bersamaan dengan kegiatan penanaman seribu pohon tersebut, pada tahun yang sama telah dilaksanakan pula kegiatan ekspedisi perbatasan yang rutin dilakukan sekali setahun berupa kegiatan menelusuri patok 1 hingga patok 18 yang merupakan jumlah patok perbatasan yang ada di sepanjang Pulau Sebatik. Ekspedisi perbatasan tersebut dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka Kecamatan Sebatik Tengah dalam rangka memperkenalkan dan mengenali batas-batas negara di perbatasan. Dua kegiatan yang bertema kedaulatan negara tersebut didukung dan diikuti langsung baik oleh aparat pemerintah tingkat desa, tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten beserta personel aparat TNI yang bertugas di Sebatik.

Aksi masyarakat Desa Sungai Limau dalam menjaga batas negara dan membela hak milik negara dilakukan secara tradisional dan sangat heroik. Hal ini dikarenakan aktivitas pekerjaan mereka yang secara turun temurun merupakan petani kakao maupun sawit yang lahannya kebetulan berada tepat di batas negara termasuk *buffer zone* yang menjadi zona bebas militer diserahkan kepada warga untuk dikelola menjadi lahan perkebunan.

Batas negara yang harusnya di atur oleh aturan internasional menjadi bersifat sangat tradisional dan kedaerahan di desa tersebut. Antar warga masyarakat petani kebun di wilayah Sebatik Indonesia yang berada tepat di batas negara juga bertetangga dengan petani kebun di wilayah sebatik Malaysia. Sehingga yang terjadi adalah masalah batas kebun dan sengketa dua pemilik lahan yang berbeda negara menjadi urusan privasi yang membawa nama negara. Hal ini menjadi potensi bela negara bagi masyarakat Desa karena rasa memiliki wilayah Indonesia (*sense of belonging Indonesia*) dalam mempertahankan batas wilayah kedaulatan NKRI diperkuat oleh hak milik pribadi yakni lahan kebun yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari. Apalagi, bagi warga Desa Sungai Limau yang mayoritas berdarah Bugis, memiliki prinsip yang tinggi dalam mempertahankan hak kepemilikan yang bersifat privasi yang menjadi harga diri. Istilah *siri'* oleh masyarakat Bugis, sering diartikan sebagai malu ataupun harga diri, tak akan segan-segan untuk menumpahkan darah dan menghunus badik atau *tappi'* (senjata khas etnis Bugis) demi membela hak milik dan harga diri mereka.

Sikap aktif masyarakat dalam mengikuti aktivitas organisasi kemasyarakatan dengan keberadaan PKK, organisasi keagamaan OM JOKO dan organisasi Kepemudaan PEPSIL serta keikutsertaan warga desa dengan organisasi Forum Bela Negara menunjukkan bahwa masyarakat desa aktif dalam organisasi masyarakat. Hal

ini sejalan dengan konsepsi Ditjenpothan Kementerian Pertahanan (2014) terkait kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator nilai bela negara berupa berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat, profesi maupun politik. Sikap aktif masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan akan berdampak bagi kemajuan desa Sungai Limau sebagai desa perbatasan, dimana dukungan warga bagi pemerintah baik dalam bentuk sumbangan pemikiran, maupun dalam bentuk sumbangan tenaga lewat berbagai aktivitas masyarakat dalam berbagai organisasi, akan memberikan kekuatan bagi proses pembangunan desa Sungai Limau yang menjadi beranda terdepan NKRI.

Begitupun halnya dengan data yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat perbatasan di Desa Sungai Limau cukup tinggi baik pada ajang pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 yang berlangsung tahun 2014 yang lalu. Begitupun halnya pada pemilihan Gubernur Provinsi, bupati dan desamenunjukkan angka statistik yang cukup baik meskipun masih diperlukan peningkatan partisipasi pemilih. Hal ini pun sejalan dengan konsepsi ditjenpothan (2014) terkait kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator nilai bela negara berupa ikut serta dalam pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat yang signifikan menjadi indikator bahwa masyarakat Desa Sungai Limau memiliki tingkat dukungan dan harapan yang tinggi terhadap pemerintah serta masih memiliki *sense of belonging* (Rasa

Memiliki) Indonesia sebagai bagian dari mereka, di tengah jauhnya aksesibilitas ke pusat pemerintahan Indonesia. Daerah perbatasan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk lantas tidak turut berpartisipasi dalam proses demokrasi tersebut.

Selain itu, aksi masyarakat desa Sungai Limau yang dimotori oleh Forum Bela Negara Sebatik lewat penanaman seribu pohon yang dimulai dari patok 5-6, lalu di tahun berikutnya di patok 6-7 yang lokasinya berada dalam area Desa Sungai Limau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk menegaskan titik-titik perbatasan yang mulai kabur dan rawan penyerobotan dari negeri jiran. Begitupun kegiatan ekspedisi perbatasan yang rutin dilakukan sekali setahun berupa kegiatan menelusuri patok 1 hingga patok 18 yang merupakan jumlah patok perbatasan yang ada di sepanjang Sebatik Indonesia yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka Kecamatan Sebatik Tengah dalam rangka memperkenalkan dan mengenali batas-batas negara di perbatasan. Dua kegiatan yang bertema menjaga kedaulatan negara tersebut sejalan pula dengan konsepsi tatanan dasar Bela Negara Kementerian pertahanan yakni nilai-nilai bela negara dengan indikator berupa berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aksi masyarakat dalam mempertegas patok-patok perbatasan negara di perbatasan Sebatik sangat relevan di tengah status OBP (*Outstanding Boundary Problems*) di titik patok perbatasan negara yang dalam

klaimnya bergeser dari kesepakatan 4' 10" LU sesuai perjanjian Inggris dan Belanda 1891, sehingga berpotensi merugikan Indonesia yang hanya dibatasi oleh patok yang hanya berjumlah 18 buah yang membentang lurus membagi Sebatik menjadi dua negara. Keberadaan penanaman ribuan pohon-pohon yang membentang sepanjang patok perbatasan diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menjaga kedaulatan negara dari potensi pergeseran yang dapat merugikan NKRI.

Implementasi nilai-nilai bela negara berupa kesadaran berbangsa dan bernegara lewat aktifnya masyarakat dalam mengikuti organisasi dan kegiatan sosial, partisipasi dalam mengikuti pemilihan umum dan partisipasi dalam menjaga kedaulatan negara pada akhirnya bermuara pada loyalitas tinggi yang dimiliki oleh warga perbatasan tersebut kepada pemerintah dan negaranya. Sebagaimana dikatakan oleh Hasanuddin³⁴ bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara akan diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Kekuatan loyalitas masyarakat kepada negara ini akan mempersempit potensi terjadinya ancaman *proxy war*, sebagaimana contoh-contoh indikasi *proxy* yang berkembang di Indonesia saat ini³⁵. Dalam hal ini, sebagai contoh bentuk *proxy war* yaitu terjadinya separatisme di masyarakat dengan mengembangkan isu bahwa perbatasan menjadi anak tiri dari pemerintah pusat, sehingga mereka

³⁴ TB Hasanuddin, *op.cit.*

³⁵ Gatot Nurmantyo, *op.cit.*

diprovokasi untuk memisahkan diri dengan negara oleh pihak musuh ataupun bentuk *proxy war* berupa masuknya narkoba di kawasan perbatasan yang dapat menjadi menjadi pintu strategis masuknya narkoba dari luar negeri.

Implementasi Penguatan Nilai-nilai Bela Negara berupa Keyakinan akan Pancasila sebagai Ideologi dan Alat Pemersatu Bangsa dan Negara di Desa Sungai Limau

Berdasarkan studi, ditemukan pula bahwa implementasi nilai-nilai bela negara, menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan, antara lain adanya interaksi positif yang berlangsung antara masyarakat yang berbeda etnis dan agama, yaitu antara masyarakat etnis Bugis yang beragama Islam dengan masyarakat etnis Timor yang beragama Katolik di Desa Sungai Limau. Interaksi yang positif tersebut mampu menunjukkan persatuan di tengah perbedaan identitas etnis dan agama yang mereka miliki. Berdasarkan konsepsi Kementerian Pertahanan³⁶ dalam penjabaran indikator nilai-nilai bela negara, dalam hal keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut:

- a. Paham nilai-nilai dalam Pancasila;
- b. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara;
- d. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila;

- e. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam studi ini ditemukan bahwa pengamalan nilai-nilai bela negara berupa keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara dengan menjadikannya sebagai alat pemersatu bangsa terlihat sangat signifikan dalam praktiknya di Desa Sungai Limau. Perbedaan etnis dan agama antara kelompok pendatang pemula dari Sulawesi Selatan dengan kelompok pendatang baru dari NTT yang merupakan eks TKI Malaysia berjalan harmonis dan menunjukkan persatuan. Oleh masyarakat Etnis Timor yang beragama Katolik, menyatakan bahwa Semangat *Bhinneka Tunggal Ika*-lah yang menyebabkan mereka bisa hidup secara damai dan mengedepankan toleransi. Begitupun halnya dengan masyarakat Bugis yang beragama Islam lewat pengamalan Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mereka meyakini prinsip *Hablum minan nas* (Hubungan yang baik antar sesama manusia) dan prinsip *lakum dii nukum wa liyadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku), yang merupakan esensi dari sikap toleransi dalam Islam. Sehingga tidak ditemukan masalah berupa potensi perpecahan karena perbedaan tersebut. Justru yang terlihat dan menjadi budaya adalah adanya sikap saling menghargai satu sama lain dan dapat bekerja sama dengan baik diantara sesama pemeluk agama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Selain itu, diantara mereka terdapat prinsip bersama bahwa mereka

³⁶ Ditjenpothan Kementerian Pertahanan, *op.cit.*

yakni etnis Bugis dan etnis Timor adalah sama sama etnis pendatang di Kalimantan sehingga mereka harus mengedepankan kebersamaan.

Hubungan yang baik yang ditunjukkan oleh kedua kelompok berbeda etnis dan agama ini dalam interaksi sehari-harinya, memiliki semacam komitmen bersama bahwa ketika muncul gesekan kecil antara dua kelompok warga, maka akan diupayakan untuk selesai secara kekeluargaan tanpa harus membawanya ke ranah hukum, sehingga bila ada masalah sedikit akan segera diselesaikan dengan jalur kekeluargaan.

Persatuan berupa toleransi antar umat beragama diantara dua kelompok tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan pemuda gereja maupun pemuda masjid yang saling membantu ketika melaksanakan perayaan hari agama. OM JOKO (Orang Muda Berjoko), organisasi kepemudaan tersebut dibentuk untuk menjadi wadah pemersatu pemuda Gereja dan remaja Masjid di desa Sungai Limau yang tidak ditemukan di desa-desa yang lain di pulau Sebatik. OM JOKO yang diresmikan pada tanggal 28 oktober 2015 saat acara sumpah pemuda memperkuat persatuan antara pemuda Muslim dan Kristen. Hal ini ditunjukkan dengan sikap kerja sama misalnya Saat remaja masjid merayakan acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W, maka remaja Katolik akan ikut membantu mendekor dan menghadiri acara maulid tersebut. Begitupun sebaliknya saat acara natalan tiba, remaja masjid akan turut

serta melakukan pengamanan di luar gereja bersama aparat. Bahkan, sekolah Islam Tapal Batas yang merupakan Yayasan Islam yang ada di Desa Sungai Limau pada proses pembangunannya, banyak dibantu oleh warga Lourdes yang notabene beragama Kristen dan diantara warga Lourdes terdapat diantara mereka yang ikut belajar untuk mengambil paket C di Yayasan Islam tersebut. Hubungan yang berjalan dengan baik antara dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat Suku Bugis dengan masyarakat Suku Timor menunjukkan pengamalan nilai-nilai Pancasila berjalan baik di sana.

Selain itu, Dalam praktiknya pengamalan kepada keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara yang diaktualisasikan dalam praktik toleransi beragama di Desa Sungai Limau menjadi khas ketika masyarakat yang berbeda etnis dan agama tersebut melahirkan semacam tradisi lokal baru diantara etnis bugis yang beragama Islam dan etnis Timor yang beragama Katolik yaitu adanya semacam peleburan dalam melaksanakan dua tradisi yang berbeda dalam hal penyajian aneka hidangan makanan daerah. Etnis Timor ketika melaksanakan perayaan penjamuan pernikahan, maka akan ditemukan masakan khas etnis bugis seperti “goreng-goreng”, “tumpi-tumpi” hingga “nasu bale” dalam jajaran hidangan-hidangan makanan etnis timor yang disajikan untuk tamu pernikahan, begitupun sebaliknya akan ditemukan pula masakan khas etnis timor yang berbahan sayur-sayuran dalam hidangan masakan etnis bugis dalam penjamuannya. Tidak

hanya dalam acara-acara pernikahan, tradisi kedaerahan baik bugis maupun Timor akan memperlihatkan hal yang serupa. Hal ini terjadi karena dua kelompok etnis ini saling gotong royong dan kerap bergantian untuk saling masak memasak di tempat acara hajatan di gelar, ketika yang memiliki hajatan jamuan adalah etnis Timor, maka sekelompok ibu-ibu dari etnis Bugis akan berbondong-bondong membantu tuan rumah etnis Timor yang menggelar hajatan untuk memasak sesuai dengan masakan khas daerah Bugis dan begitupun sebaliknya. Bahkan lebih jauh lagi, sudah tercatat ada 5 warga etnis Timor dan Bugis yang melakukan pernikahan (Amalgamasi) dan melahirkan keturunan, padahal pernikahan antara etnis timor yang notabene beragama Katolik dan Bugis yang beragama Islam akan sulit ditemukan di daerah lain, perbedaan keyakinan dan tradisi kerap menjadi penghalang utama. Hal ini pada akhirnya melahirkan komitmen bersama untuk bersatu sebagai sebuah komunitas masyarakat di perbatasan dan menjauhi perpecahan di antara sesama anak bangsa walau harus dibedakan oleh etnis dan agama.

Keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memahami hakikat atau nilai dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian sebagaimana dinyatakan oleh Hasanuddin³⁷ telah terbangun dengan baik di desa perbatasan desa Sungai Limau. Persatuan yang terbangun antara

dua kelompok masyarakat yang berbeda agama dan etnis tersebut merupakan perwujudan dari pengamalan Pancasila. Persatuan masyarakat tersebut menjadi potensi bagi keberlangsungan negara di perbatasan, di tengah tantangan kehidupan yang terbilang sulit di perbatasan akibat tingkat aksesibilitas yang jauh dari kontrol pusat sementara kedekatan dan akses kebutuhan dengan negeri jiran menjadi sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Persatuan yang terbangun di antara kelompok masyarakat Desa Sungai Limau tersebut secara tidak langsung akan memperkuat kedaulatan negara di perbatasan, dimana masyarakat yang berada di garis-garis batas negara memiliki kekuatan yaitu persatuan di tengah perbedaan yang selama ini kerap menjadi pemicu perpecahan di wilayah lain Indonesia. Kekuatan persatuan yang berkembang tersebut akan mempersulit ruang gerak terjadinya *proxy war* dalam bentuk bentrok antar kelompok yang diindikasikan sebagai bagian dari bentuk perang *proxy* masa Kini untuk memecah belah anak bangsa dan melemahkannya.³⁸ Kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan oleh warga desa perbatasan menjadi sebuah contoh menarik dari perbatasan di tengah ujian perpecahan di negara ini yang dipicu oleh isu-isu SARA akhir-akhir ini.

³⁷ TB. Hasanuddin, *op.cit.*

³⁸ Gatot Nurmantyo, *op.cit.*

Kesimpulan

Implementasi nilai-nilai Bela Negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan lewat sikap dan praktik yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai berikut:

1. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan lewat bentuk keaktifan dan dukungan masyarakat dalam mengikuti organisasi masyarakat dan kegiatannya yang berorientasi pada pembangunan bangsa dan negara, partisipasi dalam pemilihan umum dan turut menjaga kedaulatan negara lewat aktivitas yang rutin digelar oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya dukungan penuh dan bantuk loyalitas warga perbatasan terhadap negara dan pemerintahan.
2. Adapun keyakinan akan ideologi Pancasila yang ditunjukkan lewat sikap persatuan dan toleransi antar kelompok masyarakat di tengah perbedaan etnis maupun agama. Hal ini menunjukkan adanya sikap persatuan masyarakat di tengah perbedaan identitas yang mereka miliki.

Sikap dan praktik tersebut menjadi sebuah kekuatan yang dapat dikembangkan di dalam masyarakat perbatasan untuk menjadi daya tangkal terhadap ancaman *proxy war* yang

bersifat *soft power*, baik berupa godaan separatisme untuk melepaskan diri dari NKRI, masuknya narkoba lewat perbatasan hingga bentrok antar kelompok masyarakat di perbatasan yang dapat merusak persatuan dan keutuhan bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

- Ariwibowo, dkk. 2012. *Kajian Akademis Usulan Daerah Otonomi Baru Kota Sebatik Kalimantan Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Arifin, Saru. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pertahanan.
- Direktorat Jenderal Pertahanan. 2014. *Tataran Dasar Bela Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Ditjen Pothan.
- Hasanuddin, TB. 2014. *Bela Negara dan Kontradiksi Wacana Wajib Militer Indonesia*. Jakarta : PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2008. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta: PT Gava Media.
- Kurnia, Mahendra Putra. 2011. *Kawasan Perbatasan RI: Kesabaran Tak Terbatas Menanti Janji Sebatas Janji*. Malang : PT. Intrans Institute.
- Mardjoko, Budi. 2013. *Implementasi Program Garda Batas dalam rangka Bela Negara di Pulau Sebatik*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Mardin. 2014. *Profil Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan*. Sebatik Tengah: Desa Sungai Limau.

Nurmantyo, Gatot. 2015. *Perubahan Latar Belakang dan Daerah Konflik : Tantangan dan Ancaman Terhadap Sistem Pertahanan dan Bela Negara*. Jakarta : Mabes TNI

Nuraesnaini, Poppy Setiawati. 2013. *Adaptasi Nelayan Kawasan Perbatasan di Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara*. Bandung: Universitas Padjajaran

Syarbani, Syahrial. 2012. *Konsep Dasar Sosiologi dan Antropologi Teoridan Aplikasi*. Jakarta : PT Hartomo Media Pustaka.

Sutisna, Sobar. 2011. *Kajian Pertahanan Perbatasan, Rencana Pengembangan Kota Mandiri Pulau Sebatik Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta : Universitas Pertahanan

Subagyo, Agus. 2015. *Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.

Jurnal

Sariama, Irma. 2014. *Peran TNI dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik*. Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.2. No.1.

UUD dan UU

UUD 1945 Pasal 27 dan pasal 30 tentang Upaya Bela negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.